



## Analisis Kontribusi Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatanbarang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Dan Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023

Amelia Siallagan<sup>1</sup>, H. Dailibas<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat

---

Received:	06 Februari 2026	<b>Abstrak</b>	<i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang selama periode 2019–2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan mixed method, yaitu menggabungkan analisis kuantitatif berupa rasio kontribusi, efektivitas, dan efisiensi, serta analisis kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pemanfaatan BMD terhadap PAD di kedua daerah masih sangat rendah, dengan rata-rata kontribusi di bawah 1%. Namun, efektivitas pemanfaatan BMD tergolong tinggi karena realisasi pendapatan dari BMD selalu melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dari sisi efisiensi, kedua daerah menunjukkan efisiensi maksimal karena seluruh biaya pemanfaatan ditanggung oleh mitra, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 0%. Meskipun efisien dan efektif dalam pelaksanaan, nilai kontribusi terhadap PAD belum optimal akibat keterbatasan bentuk pemanfaatan aset dan belum maksimalnya eksplorasi potensi aset yang dimiliki. Penelitian ini merekomendasikan strategi diversifikasi bentuk pemanfaatan aset, peningkatan transparansi informasi aset, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kontribusi BMD terhadap PAD.</i>
Revised:	16 Februari 2026	<b>Kata Kunci:</b>	<i>Barang Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah, kontribusi, efektivitas, efisiensi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang.</i>
Accepted:	28 Februari 2026		

(\*) Corresponding Author: ameliasiallagan@gmail.com

**How to Cite:** Siallagan, A., & Dailibas, H. (2026). Analisis Kontribusi Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatanbarang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Dan Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.A), 196-211. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13834>.

---

### PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki kekayaan sumber daya dan aset yang beragam, yang perlu dikelola secara optimal untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola kekayaan daerah dan memanfaatkan peluang yang ada guna meningkatkan pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, seperti pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah. PAD sendiri bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Salah satu aset daerah yang sangat penting adalah Barang Milik Daerah (BMD). BMD dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan BMD yang optimal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap

PAD. BMD dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pada kenyataannya, pengelolaan dan pemanfaatan BMD masih menghadapi berbagai tantangan. Data Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang menunjukkan fluktuasi pencapaian target PAD pada tahun 2019-2023. Kota Bekasi pada 2019, pencapaiannya hanya sebesar 72,99%, lalu meningkat signifikan pada 2020 menjadi 97,79%. Bahkan pada 2021, realisasi melampaui target dengan capaian 101,76%. Namun, pada 2022 dan 2023 kembali menurun menjadi 95,83% dan 91,08%.

Sementara itu, Kabupaten Karawang menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan konsisten tinggi. Pada 2019, capaian hampir sempurna sebesar 99,79%. Bahkan pada 2020 dan 2021, realisasi pendapatan jauh melampaui target dengan persentase pencapaian masing-masing 119,22% dan 115,73%. Pada 2022, pencapaian sedikit menurun menjadi 99,76%, tetapi masih sangat mendekati target. Pada 2023, capaian kembali melebihi target yaitu 105,14%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan potensi PAD, termasuk yang berasal dari BMD, masih perlu dioptimalkan. Perbedaan kebijakan pengelolaan, tata kelola keuangan, dan penerapan strategi optimalisasi BMD antara kedua daerah memiliki peran penting yang mempengaruhi hasil tersebut.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kontribusi pemanfaatan BMD terhadap PAD masih relatif rendah dan cenderung fluktuatif. seperti yang dilakukan oleh (Sofyan et al., 2021) yang meneliti tentang Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019 yang mendapatkan hasil kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah (BMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sangat rendah dan cenderung fluktuatif menunjukkan adanya pertumbuhan kecil di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian lainnya adalah (Sakeh et al., 2022) yang meneliti tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten Timor Tengah Selatan) yang mendapatkan hasil realisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) selalu dibawah target dan kontribusi barang milik daerah (BMD) sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai pemanfaatan BMD dalam meningkatkan PAD, terutama di Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kontribusi, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan BMD terhadap PAD Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang tahun 2019-2023. Dengan menganalisis kontribusi pemanfaatan BMD terhadap PAD, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar peran BMD dalam meningkatkan PAD. Analisis efektivitas pemanfaatan BMD dapat menunjukkan apakah pemanfaatan BMD telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, analisis efisiensi pemanfaatan BMD dapat menunjukkan apakah biaya yang dikeluarkan untuk pemanfaatan BMD telah sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMD untuk mendukung pencapaian target PAD secara efektif dan efisien. Rekomendasi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Grand Theory**

*Stewardship theory* (Davis & Donaldson, 1991), menggambarkan suatu keadaan dimana manajemen tidak mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan fokus pada kepentingan dan keinginan prinsipal serta menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, dan bersikap jujur terhadap pihak lain. *Stewardship theory* memposisikan pemerintah daerah sebagai *steward* atau pelayan yang bertanggungjawab mengelola sumber daya berupa aset daerah.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana publik serta tercapainya pelayanan masyarakat tanpa mencari keuntungan.

### **Barang Milik Daerah**

Barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari barang yang diperoleh melalui mekanisme hibah, sumbangan, atau bentuk sejenis lainnya, barang yang diperoleh sebagai hasil pelaksanaan perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta barang yang diperoleh melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

### **Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah (BMD) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah (BMD) dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dengan adanya pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang optimal, diharapkan dapat memberikan dampak ekonomis bagi pemerintah untuk mendukung pendapatan daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu penambah nilai kekayaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

### **Kontribusi**

Kontribusi adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi barang milik daerah (BMD) melalui pemanfaatan dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) (Sari et al., 2023).

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan keterkaitan antara output dengan tujuan, apabila kontribusi output yang diberikan cukup besar terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula organisasi tersebut, suatu organisasi atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2019:86).

### **Efisiensi**

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa hasil yang didapatkan dengan input berupa sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Suatu organisasi atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*) (Mahmudi, 2019: 85).

### **Hipotesis Penelitian**

Dikarenakan penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Priadana & Sunarsi, 2021:26). Penelitian yang bersifat deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2019:99).

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *mixed method* yang menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Priadana & Sunarsi, 2021: 26). *Mixed method* atau metode kombinasi merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif (Sugiyono, 2019:40).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi memerlukan dokumen yang berkaitan dengan data realisasi dan target pendapatan asli daerah (PAD), data realisasi dan target pemanfaatan barang milik daerah (BMD) dan data mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pemanfaatan barang milik daerah (BMD) Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang selama periode 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari setiap informan terkait pemanfaatan barang milik daerah (BMD).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif melalui tahapan pengumpulan data dengan dokumen terlebih dahulu. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data sampel melalui sumber data dokumen yang sudah dikumpulkan, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dihitung dengan menggunakan rasio guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemanfaatan barang milik daerah (BMD). Hasil dari perhitungan rasio yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjelaskan makna dan angka yang diperoleh dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Sementara itu, data yang dihimpun dari para responden melalui kegiatan wawancara di lapangan akan disusun dan dijelaskan secara deskriptif untuk mendukung hasil analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dianalisis menggunakan:

#### a. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pemanfaatan BMD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio kontribusi, maka semakin baik pemanfaatan barang milik daerah (BMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Adapun nilai kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0.00% - 10%	Sangat Kurang

10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Sari et al., 2023

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemanfaatan BMD}}{\text{Target pemanfaatan BMD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin efektif pemanfaatan barang milik daerah (BMD) dalam mencapai target. Adapun nilai efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% - di atas 100%	Efektif
85% - 99%	Cukup Efektif
65% - 84%	Kurang Efektif
Kurang dari 65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya untuk pemanfaatan BMD}}{\text{Realisasi pemanfaatan BMD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio efisiensi, maka semakin tidak efisien pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang dilakukan. Adapun nilai efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi

Persentase	Kriteria
Kurang dari 90%	Sangat Efisien
90% - 99%	Efisien
100%	Cukup Efisien
Lebih dari 100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Temuan Penelitian

Tabel 4. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase pencapaian
2019	3.346.023.558.77 9,00	2.442.151.873.74 6,89	72,99%
2020	2.095.144.155.83 3,00	2.048.909.314.82 0,00	97,79%
2021	2.492.954.556.47 9,00	2.536.707.290.38 7,00	101,76%

202 2	2.711.748.499.92 7,00	2.598.632.223.39 8,00	95,83%
202 3	2.997.679.830.47 9,00	2.730.403.781.66 2,00	91,08%

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah oleh peneliti)

Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, yaitu pendapatan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 72,99% tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan persentase pencapaian sebesar 97,79% tetapi masih tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan persentase pencapaiannya menjadi yang terbesar selama tahun 2019-2023 yaitu sebesar 101,76%. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,83% dan 91,08%.

Tabel 5. Laporan Realisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2019	4.452.095.800,0 0	3.774.358.409,0 0	84,78%
2020	3.053.332.400,0 0	4.643.020.870,0 0	152,06%
2021	3.587.336.407,0 0	3.770.228.312,0 0	105,10%
2022	4.050.104.000,0 0	4.349.043.324,0 0	107,38%
2023	4.050.104.000,0 0	5.238.342.052,0 0	129,34%

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah oleh peneliti)

Menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) Kota Bekasi mengalami fluktuasi pencapaian setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pemanfaatan barang milik daerah (BMD) tidak mencapai target dan hanya terealisasi sebesar 84,78% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat, persentase pencapaiannya menjadi yang terbesar selama tahun 2019-2023 yaitu sebesar 152,06% jauh diatas target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi pemanfaatan mengalami penurunan, namun masih mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase pencapaian sebesar 105,10%. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi pemanfaatan mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun dengan persentase pencapaian sebesar 107,38% dan 129,34%.

Terkait biaya penjagaan, pemeliharaan, dan perawatan serta waktu dan tenaga yang perlu dikeluarkan dalam memanfaatkan barang milik daerah (BMD). Pemerintah Kota Bekasi menyerahkan semua tanggungjawab terkait biaya-biaya tersebut kepada pihak yang memanfaatkan sehingga tidak menyediakan dan mengeluarkan anggaran untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pemanfaatan barang milik daerah (BMD), melainkan semua biaya ditanggung oleh mitra.

Tabel 6. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase pencapaian
2019	1.359.135.747.661,00	1.356.319.882.910,25	99,79%
2020	1.093.226.521.195,00	1.303.353.416.438,35	119,22%
2021	1.427.192.019.181,00	1.651.850.841.989,00	115,74%
2022	1.621.685.295.499,00	1.617.783.012.031,00	99,76%
2023	1.676.368.895.340,00	1.762.512.066.251,91	105,14%

Sumber: BPKAD Kab. Karawang, 2025 (diolah oleh peneliti)

Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, yaitu pendapatan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 99,79% belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat, persentase pencapaiannya menjadi yang terbesar selama tahun 2019-2023 yaitu sebesar 119,22% jauh diatas target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 115,73% dan 99,76%. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 105,14% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Laporan Realisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2019	471.715.200,00	756.398.065,00	160,35%
2020	635.933.634,00	725.517.725,00	114,09%
2021	660.267.875,00	759.474.550,00	115,03%
2022	678.894.600,00	876.809.600,00	129,15%
2023	1.010.000.000,00	1.129.091.525,00	111,79%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang, 2025 (diolah oleh peneliti)

Menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun mengalami fluktuasi pencapaian setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pemanfaatan barang milik daerah (BMD) terealisasi sebesar 160,35% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 114,09%. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 115,02%, disusul pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan kembali sebesar

129,15%. Kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 111,79% dari target yang telah ditetapkan.

Terkait biaya penjagaan, pemeliharaan, dan perawatan serta waktu dan tenaga yang perlu dikeluarkan dalam memanfaatkan barang milik daerah (BMD). Pemerintah Kabupaten Karawang tidak menyediakan dan mengeluarkan anggaran untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pemanfaatan barang milik daerah (BMD), melainkan semua biaya ditanggung oleh mitra atau pihak penyewa.

### **Pembahasan Hasil Temuan**

Tabel 8. Perbandingan Rasio Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Karawang	Kota Bekasi
2019	0,056%	0,155%
2020	0,056%	0,227%
2021	0,046%	0,149%
2022	0,054%	0,167%
2023	0,064%	0,192%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Dari data diatas dapat dilihat hasil analisis Perbandingan Rasio Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi Tahun 2019-2023, berdasarkan data rasio kontribusi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun terakhir, Kota Bekasi secara konsisten menunjukkan angka kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karawang. Pada tahun 2019–2023, rasio kontribusi Kota Bekasi berkisar antara 0,149% hingga 0,227%, sedangkan Kabupaten Karawang hanya berkisar antara 0,046% hingga 0,064%. Meskipun secara persentase kedua daerah masih mencatat kontribusi yang rendah karena berada di bawah 1%, namun secara tren terlihat bahwa Kota Bekasi lebih agresif dalam mengoptimalkan asetnya dibandingkan Karawang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hario Rizki Sugianto, diperoleh informasi bahwa kontribusi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bekasi memang belum optimal, meskipun pemerintah daerah telah memiliki mekanisme penetapan target tahunan. Penetapan ini masih bersifat historis yang didasarkan realisasi lima tahun terakhir, tanpa disertai pendekatan berbasis potensi ekonomi maksimal. Hal ini mengindikasikan belum adanya proyeksi aktif untuk mendorong optimalisasi kontribusi.

Kontribusi Kota Bekasi masih didominasi oleh skema sewa aset yang menghasilkan pendapatan melalui pemanfaatan berupa sewa, namun banyak aset yang digunakan dalam bentuk pinjam pakai yang tidak membayar atau bangun guna serah (BGS) yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, keterbatasan promosi aset dan sistem informasi yang belum terbuka turut menjadi penyebab minimnya hasil pemanfaatan barang milik daerah (BMD).

Meski begitu, pemerintah Kota Bekasi telah menunjukkan inisiatif perbaikan. Upaya seperti revisi tarif melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penagihan piutang, dan pemetaan aset yang menghasilkan kontribusi, serta pengawasan evaluatif per semester menunjukkan bahwa Bekasi mulai berbenah untuk

meningkatkan kontribusi. Evaluasi berkala oleh Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah juga memperlihatkan adanya kesadaran penguatan sistem pemanfaatan aset.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Ira Nury menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang juga menghadapi tantangan serupa, bahkan dengan tingkat kontribusi yang lebih rendah. Meskipun target kontribusi selalu tercapai secara nominal, namun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tetap kecil. Selama lima tahun terakhir, kontribusinya tidak pernah melampaui angka 0,064%.

Penyebab rendahnya kontribusi di Karawang lebih bersifat struktural. Pemerintah Kabupaten Karawang hanya memanfaatkan barang milik daerah (BMD) dalam bentuk sewa lahan terutama sawah dan belum membuka bentuk pemanfaatan lainnya seperti kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, atau bangun guna serah. Selain itu, banyak aset yang belum dinilai dan belum dipetakan potensinya, serta masih terdapat kelemahan dari sisi internal SKPD yang kurang aktif dalam mendorong pemanfaatan aset.

Namun demikian, sistem pengelolaan dan pelaporan di Karawang cukup tertib. Proses pengawasan melalui rapat rekonsiliasi bulanan serta penggunaan Surat Tanda Setor (STS) menandakan adanya bentuk akuntabilitas. Akan tetapi, akuntabilitas tersebut belum diikuti oleh inovasi strategi pemanfaatan aset, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) belum dapat terdongkrak secara signifikan.

Dalam hal ini, Kota Bekasi unggul dalam hal nilai kontribusi, dengan rata-rata rasio kontribusi lebih tinggi dibanding Kabupaten Karawang. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih bersifat pasif dan belum berbasis strategi optimalisasi aset secara maksimal. Pemerintah Kota Bekasi perlu memperluas bentuk pemanfaatan, meningkatkan promosi aset, serta mendorong digitalisasi sistem pemanfaatan untuk memperluas jangkauan pengguna aset daerah. Di sisi lain Kabupaten Karawang tertinggal dari sisi kontribusi, baik secara nominal maupun persentase. Keterbatasan bentuk pemanfaatan serta lemahnya pemetaan aset menyebabkan peluang kontribusi yang sebenarnya potensial menjadi tidak tergarap. Evaluasi yang dilakukan sudah berjalan, namun belum disertai langkah konkret untuk meningkatkan keragaman dan nilai kontribusi dari aset daerah.

Secara umum, pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di kedua daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena masih berada jauh di bawah angka 1%. Namun, tren data menunjukkan bahwa Kota Bekasi cenderung lebih progresif dibandingkan Kabupaten Karawang. Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kedua pemerintah daerah agar dapat menyusun kebijakan yang lebih strategis, aktif, dan berbasis data potensi aset secara menyeluruh. Optimalisasi kontribusi barang milik daerah (BMD) ke depan sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor, transparansi data aset, inovasi bentuk pemanfaatan, dan penguatan regulasi yang mendorong partisipasi pihak ketiga dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 9. Perbandingan Rasio Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Karawang	Kota Bekasi
2019	160,35%	84,78%
2020	114,09%	152,06%
2021	115,03%	105,10%

2022	129,15%	107,38%
2023	111,79%	129,34%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Dari data diatas dapat dilihat hasil analisis Perbandingan Rasio Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi Tahun 2019-2023, berdasarkan data rasio efektivitas pemanfaatan barang milik daerah (BMD) data tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki rata-rata efektivitas yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan Kota Bekasi. Karawang mencatatkan efektivitas tertinggi sebesar 160,35% pada tahun 2019 dan terendah 111,79% pada tahun 2023. Sementara itu, Kota Bekasi menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, dari 84,78% pada tahun 2019 hingga 152,06% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kedua daerah berhasil melebihi target pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang telah ditetapkan setiap tahun, namun dengan perbedaan stabilitas pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hario Rizki Sugianto, diketahui bahwa Kota Bekasi menerapkan pendekatan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang cukup baik dengan monitoring berkala, evaluasi perjanjian sewa, dan tinjauan lapangan. Efektivitas diukur bukan hanya dari sisi realisasi pendapatan terhadap target, tetapi juga dari kesesuaian penggunaan aset dengan peruntukannya. Strategi ini menghasilkan capaian efektivitas yang tergolong tinggi pada sebagian besar tahun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akurasi target dan kualitas pelaksanaan pemanfaatan.

Namun, efektivitas ini masih belum mencerminkan potensi menyeluruh dari seluruh barang milik daerah (BMD) yang ada. Hal ini karena sebagian besar aset hanya dimanfaatkan dalam bentuk sewa tanah, sementara bentuk pemanfaatan seperti pinjam pakai atau bangun guna serah (BGS) tidak menghasilkan pendapatan langsung dan tidak dimasukkan dalam capaian efektivitas. Selain itu, beberapa aset seperti kendaraan digunakan oleh instansi vertikal tanpa memberikan kontribusi pendapatan. Dengan demikian, tingginya efektivitas belum menggambarkan optimalisasi seluruh aset, melainkan hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam perhitungan retribusi.

Kota Bekasi telah mulai menyusun strategi pemanfaatan aset idle melalui penjualan atau optimalisasi ulang terhadap bangunan yang tidak produktif, yang bertujuan untuk menghindari beban biaya perawatan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa Bekasi telah memiliki orientasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara menyeluruh.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ira Nury, efektivitas pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di Kabupaten Karawang juga tergolong sangat tinggi, bahkan menunjukkan tingkat kestabilan yang baik selama lima tahun terakhir. Realisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) selalu melebihi target, dengan efektivitas paling tinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 160,35%. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi teknis pelaksanaan, pengelolaan aset berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai secara konsisten.

Namun, capaian efektivitas ini memiliki keterbatasan penting. pemerintah Kabupaten Karawang selama ini hanya memanfaatkan barang milik daerah (BMD) dalam bentuk sewa tanah khususnya tanah sawah. Belum terdapat ragam bentuk pemanfaatan lain seperti kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, atau bangun gunas serah (BGS). Akibatnya, tingginya efektivitas hanya mencerminkan keberhasilan pengelolaan dalam satu jenis pemanfaatan saja, bukan keseluruhan potensi aset yang dimiliki oleh daerah. Evaluasi yang dilakukan melalui

pelaporan realisasi retribusi dan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK memang mendorong kepatuhan dan transparansi, namun belum mendorong ekspansi model pemanfaatan aset secara luas.

Sebagai tanggapan yang diberikan, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan kajian terhadap aset yang idle (idle asset), sebagai langkah awal untuk membuka peluang pemanfaatan terhadap aset-aset yang belum digunakan secara maksimal. Upaya ini menunjukkan kesadaran untuk meningkatkan efektivitas dari sisi kuantitas maupun variasi jenis pemanfaatan.

Dalam hal ini, Kota Bekasi memiliki efektivitas yang baik dan pelaksanaan yang progresif, namun masih selektif dan terbatas pada aset-aset tertentu yang menghasilkan pendapatan. Perlu dilakukan reformulasi skema pemanfaatan dan konversi atas aset non-kontributif agar efektivitas mencerminkan keseluruhan pengelolaan aset daerah. Di sisi lain, Kabupaten Karawang memiliki efektivitas yang konsisten tinggi, namun sangat terbatas dari sisi cakupan karena hanya mengandalkan sewa tanah. Diperlukan diversifikasi bentuk pemanfaatan dan penilaian potensi aset lainnya, agar efektivitas tidak hanya dilihat dari satu aspek, tetapi menyeluruh terhadap seluruh aset daerah yang dapat dimanfaatkan.

Perbandingan efektivitas antara Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa keduanya memiliki capaian yang tinggi, namun dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. Kota Bekasi lebih variatif dari sisi pengelolaan dan sistem kontrol, tetapi belum optimal dalam pemanfaatan seluruh jenis aset. Sebaliknya, Karawang berhasil menjaga efektivitas secara stabil, namun masih terbatas pada satu bentuk pemanfaatan. Oleh karena itu, evaluasi ke depan harus difokuskan pada penguatan diversifikasi pemanfaatan aset, pembukaan akses terhadap aset yang idle, serta perumusan strategi peningkatan efektivitas yang tidak hanya berbasis realisasi pendapatan, tetapi juga luasnya pemanfaatan aset secara ekonomi dan sosial. Ini penting agar efektivitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) benar-benar dapat menjadi kontributor penting dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) di masa mendatang.

Tabel 10. Perbandingan Rasio Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Karawang	Kota Bekasi
2019	0%	0%
2020	0%	0%
2021	0%	0%
2022	0%	0%
2023	0%	0%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Rasio efisiensi dalam konteks pemanfaatan barang milik daerah (BMD) menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset daerah. Semakin kecil nilai rasio efisiensi atau mendekati 0%, maka pemanfaatan dikatakan semakin efisien, karena pemerintah mampu memperoleh pendapatan tanpa mengeluarkan biaya besar. Pemerintah Kota Bekasi maupun Kabupaten Karawang, dalam hal pemanfaatan barang milik daerah (BMD) tidak menganggarkan dana untuk biaya operasional pemanfaatan barang milik daerah (BMD) karena beban biaya pemanfaatan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang memanfaatkan atau pihak mitra. Artinya

seluruh pendapatan yang diterima bersifat bersih dan beban pengeluaran berada di pihak mitra pemanfaatan. Karena hal itu, dalam hal ini efisiensi Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang dikatakan sebesar 0%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hario Rizki Sugianto, diketahui bahwa seluruh proses pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di Kota Bekasi, termasuk penjagaan, pemeliharaan, operasional, hingga perawatan aset, menjadi tanggung jawab penuh dari pihak ketiga atau mitra kerja sama. Hal ini diatur dalam perjanjian sewa, dan pemerintah tidak mengeluarkan dana secara langsung dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah (BMD).

Akibatnya, selama periode 2019–2023, rasio efisiensi Kota Bekasi selalu berada di angka 0%. Artinya, pendapatan dari barang milik daerah (BMD) diperoleh sepenuhnya tanpa pengeluaran, yang menunjukkan efisiensi anggaran secara maksimal. Pemerintah hanya bertindak sebagai pemilik dan pengawas, sementara mitra bertanggung jawab terhadap seluruh aspek teknis.

Namun, tingkat efisiensi ini belum sepenuhnya disertai dengan optimalisasi nilai ekonomi dari aset. Kontribusi barang milik daerah (BMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi tetap rendah karena berada di bawah 0,3% per tahun, yang mengindikasikan bahwa aset yang dimanfaatkan masih terbatas, atau nilai sewa yang ditetapkan masih relatif kecil. Maka, walaupun efisiensi tinggi, dampak ekonominya terhadap keuangan daerah masih belum signifikan. Oleh sebab itu, efisiensi harus diiringi dengan strategi peningkatan cakupan aset yang disewakan, revisi tarif sewa, serta konversi pemanfaatan dari skema non-retribusi ke skema yang menghasilkan pendapatan.

Situasi serupa juga ditemukan di Kabupaten Karawang, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ira Nury. Selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Karawang tidak mengeluarkan dana untuk pemanfaatan barang milik daerah (BMD). Seluruh biaya operasional, pemeliharaan, dan teknis ditanggung oleh pihak mitra, khususnya dalam skema sewa tanah sawah yang menjadi bentuk utama pemanfaatan aset.

Dengan kondisi tersebut, maka rasio efisiensi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di Kabupaten Karawang juga sebesar 0% setiap tahun selama 2019–2023. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mendapatkan pendapatan dari barang milik daerah (BMD) tanpa beban anggaran tambahan, dan seluruh pendapatan masuk ke kas daerah secara bersih. Hal ini tentu sangat menguntungkan dari sisi keuangan daerah.

Akan tetapi, tingginya efisiensi ini juga disebabkan oleh keterbatasan skema pemanfaatan, karena pemerintah daerah hanya menggunakan bentuk sewa tanah, dan belum mengembangkan bentuk kerja sama lain seperti bangun guna serah, kerja sama pemanfaatan, atau bentuk komersialisasi aset lainnya. Oleh karena itu, meskipun efisiensi tinggi, potensi pendapatan dari aset lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal, dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tetap rendah hanya sekitar 0,05%–0,06%.

Dalam hal ini, kedua daerah menunjukkan efisiensi maksimal dari sisi pembiayaan karena tidak mengeluarkan biaya langsung dan seluruh operasional ditanggung oleh mitra. Hal ini mencerminkan strategi pengelolaan yang hemat anggaran dan menguntungkan bagi daerah dari sisi efisiensi. Namun, efisiensi ini belum sejalan dengan optimalisasi pendapatan. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat rendah di kedua wilayah. Ini disebabkan oleh rendahnya cakupan aset yang dimanfaatkan dan terbatasnya model kerja sama yang digunakan. Oleh karena itu, langkah evaluatif selanjutnya adalah mengembangkan strategi pemanfaatan yang lebih luas dan agresif, tanpa mengorbankan prinsip efisiensi, agar

pendapatan asli daerah dari sektor barang milik daerah (BMD) dapat meningkat secara signifikan di masa depan.

## **KESIMPULAN**

1. **Tingkat Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
Kontribusi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kedua daerah masih tergolong sangat rendah. Pengelolaan aset, minimnya promosi dan penawaran terbuka, serta dominasi pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai di Kota Bekasi yang tidak memberikan kontribusi finansial langsung ke kas daerah dan hanya menggunakan satu bentuk pemanfaatan yaitu sewa lahan sawah di Kabupaten Karawang menyebabkan kontribusi yang belum optimal.
2. **Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, ditunjukkan oleh realisasi pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang selalu melebihi target dalam lima tahun terakhir. Tingginya efektivitas ini mencerminkan bahwa penetapan target berbasis historis dan monitoring berkala telah berjalan dengan baik. Namun, efektivitas ini belum mencerminkan potensi penuh dari aset daerah, mengingat adanya aset yang tidak dimanfaatkan atau digunakan dalam skema yang tidak menghasilkan pendapatan langsung. Di Bekasi, aset yang digunakan tidak menghasilkan pendapatan langsung seperti pinjam pakai tidak masuk dalam perhitungan efektivitas. Di Karawang, hanya aset tanah yang disewakan dan belum ada diversifikasi bentuk pemanfaatan lain.
3. **Tingkat Efisiensi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
Efisiensi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang termasuk dalam kategori sangat efisien. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam proses pemanfaatan aset, karena seluruh biaya operasional, perawatan, dan pengelolaan ditanggung oleh mitra. Dengan demikian, rasio efisiensi adalah 0% setiap tahun, menandakan beban pengeluaran yang sangat minim bagi pemerintah daerah.

Namun demikian, tingginya efisiensi belum diimbangi oleh kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi maksimal, nilai manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset belum tergarap sepenuhnya. Serta, efisiensi tinggi ini belum diiringi dengan perluasan bentuk pemanfaatan yang beragam atau peningkatan nilai ekonomi dari aset. Sehingga, pendapatan yang dihasilkan masih terbatas.

## **REKOMENDASI**

1. Untuk Pemerintah Kota Bekasi
  - a. Pemerintah Kota Bekasi harus lebih mengoptimalkan lagi sumber pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), juga perlu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) lain yang ada, sehingga dapat meminimalisir ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.
  - b. Pemerintah Kota Bekasi perlu meningkatkan strategi penawaran aset secara aktif dan terbuka kepada pihak luar serta pengembangan sistem informasi aset daerah untuk menarik mitra potensial.

- c. Pemerintah Kota Bekasi perlu mengkaji ulang aset yang selama ini digunakan dengan skema pinjam pakai dan bagun guna serah (BGS) untuk dikonversi ke skema sewa atau kerja sama lain yang menghasilkan pendapatan, tanpa mengganggu fungsi sosialnya.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Karawang
    - a. Pemerintah Kabupaten Karawang harus lebih mengoptimalkan lagi sumber pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), juga perlu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) lain yang ada, sehingga dapat meminimalisir ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.
    - b. Pemerintah Kabupaten Karawang perlu melakukan diversifikasi skema pemanfaatan aset yang menghasilkan pendapatan, tanpa mengganggu fungsi sosialnya supaya pemanfaatan tidak hanya sebatas sewa tanah sawah.
    - c. Pemerintah Kabupaten Karawang perlu melakukan penilaian ulang dan inventarisasi potensi aset, sehingga aset yang belum dinilai atau belum diketahui potensi ekonominya dapat diketahui nilai ekonominya, sehingga dapat dilakukan penetapan tarif sewa yang sesuai dan memperluas ruang pemanfaatan aset.
  3. Untuk Peneliti Selanjutnya
    - a. Apabila ada peneliti lain yang tertarik mengadakan penelitian yang hampir sama, dapat memperluas objek penelitian ke daerah lain untuk perbandingan yang lebih luas dengan menggunakan metode lain seperti menggunakan pendekatan kuantitatif lanjutan seperti regresi untuk mengukur pengaruh pemanfaatan barang milik daerah (BMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
    - b. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan indikator lain seperti legalitas aset dan diharapkan menambahkan durasi pemanfaatan untuk analisis lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. (2025). Diakses dari <https://bpkad.bekasikota.go.id/>.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. (2025). Diakses dari <https://karawangkab.go.id/>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Dilliana & Herdi. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Cv.Eureka Media Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Tersedia di: <https://bintangpusnas.com/>.
- Halim & Kusufi. (2023). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba. Tersedia di: <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/10e52049-cbde-451b-876a-9345230a2831>.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIM YKPN. Tersedia di: <https://bintangpusnas.com/>.
- Silaban, H., Fallah, S., & Kristian, F. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 8, 292–307.
- Nailufar, A., Panggabean, I., Hakiki, D., Angkat, F., & Sari, E. (2024). OPTIMIZING REGIONAL ASSET UTILIZATION: LITERATURE REVIEW. *Proceeding 2 nd Medan International Economics and Business*, 2(1), 791–799.
- Mediaty., Kartini., Ashar, A., Patiju, A., Harlina., & Bakeng, H. (2024). Analysis of Utilization

- of Regional Assets Against Regional Original Income ( Case Study of Road and Bridge Maintenance UPTD ). *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan*, 8(2), 115–130.
- Syarifudin, Kana, V., & Nilasari, D.(2023). PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA WARINGIN BARAT. 11(1), 161-164.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620–624.
- Sofyan, A., Hidayat, R., & Suryaningsih, E. (2021). ANALISIS PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH (BMD) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017-2019. 3(4).
- Astuti, Z., Hananto, S., & Asrihapsari, A. (2024). Analysis of the Effectiveness of Utilization of Regional Owned- Asset to Increase Regional Revenue. *Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 39-52).
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77.
- Nilla, C. Z. (2022). ANALISIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Kabupaten Sarmi). *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 5(1), 1–12.
- Potale, M., Saprudin, S., Masiaga, N., & Yakup, Y. (2024). Optimizing the Utilization of Local Government Assets in Gorontalo District. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 4(2), 747–758.
- Rania, C., Putri, A., & Susiloadi, P. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Semarang dan Kabupaten Pati. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(2).
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Sakeh, A. S., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2022). PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan). *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(09), 84–92.
- Sari, S. R., Mediaty, M., & Sari Saudi, N. D. (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. *Action Research*

*Literate*, 7(9), 14–20.

- Eljawati & Nurafdaliana. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 11(2), 144-155.
- Simatupang, J., Mustafa, B., & Widodo, A. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021. *Jack: Journal of Accounting Knowledge*, 1(1), 87–110.
- Sitepu, B. P. (2022). ANALYSIS OF LAND ASSETS UTILIZATION IN ENHANCING THE ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE OF KARO REGENCY GOVERNMENT, NORTH SUMATERA, INDONESIA (A STUDY ON LAND ASSETS OF KARO REGENCY GOVERNMENT IN NAGARA VILLAGE, MEREK SUB-DISTRICT). *International Journal of Economics, Commerce and Management*, X(11), 316–342.
- Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. PT Remaja Rosdakarya.
- Priadana & Sunarsi. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Pascal Books.
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. & Aji, R. (2022). Metodologi Penelitian. Media Edu Pustaka.
- Virgilius Gracelio Seran, Petrus E. De Rosari, & Cicilia A. Tungga. (2024). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Di Kabupaten Malaka. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(2), 116–130.
- Mulatsih, Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI PERIODE 2016-2020. *Jurnal Imiah MEA*, 6(3).
- Utri Dianniar. (2022). ANALISIS KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK. *Abdi Equator*, 3(1), 25-41.